



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/2BAN-PT/Akret/S/XII/2014*

**Mewirauahakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai
Demokrasi
(Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)**

Skripsi
Diajukan untuk Ujian Sidang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh
Nicky Dharmawan Kosasih
2013310004

Bandung
2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A
SK BAN –PT NO: 468/SK/2BAN-PT/Akret/S/XII/2014*

**Mewirauahakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai
Demokrasi
(Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)**

Skripsi
Diajukan untuk Ujian Sidang Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Oleh
Nicky Dharmawan Kosasih
2013310004

Bandung
2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Administrasi Publik**

**Mewirauhakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai
Demokrasi
(Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)**

Skripsi

Oleh

Nicky Dharmawan Kosasih
2013310004

Pembimbing
Tutik Rachmawati, Ph. D.

Bandung
2017

**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Nicky Dharmawan Kosasih
Nomor Pokok : 2013310004
Judul : Mewirauahakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai
Demokrasi
(Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Bandung, Januari 2017

Pembimbing

Tutik Rachmawati, S.IP., MA.

Mengetahui

Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos. M.Si.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



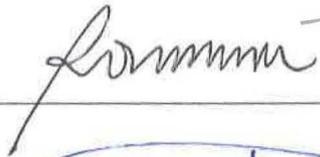
Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Nicky Dharmawan Kosasih
Nomor Pokok : 2013310004
Judul : **Mewirauahakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai Demokrasi (Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)**

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Selasa, 17 Januari 2017
Dan dinyatakan **LULUS**

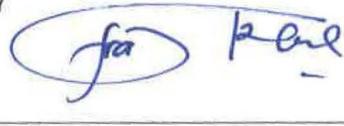
Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Maria Rosarie Harni T., S.IP., M.Si

: 

Sekretaris

Tutik Rachmawati, Ph.D

: 

Anggota

Kristian Widya Wicaksono, S.Sos., M.Si

: 

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

PERNYATAAN



Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nicky Dharmawan Kosasih
NPM : 2013310004
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Mewirauahakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai
Demokrasi (Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, Januari 2017



Nicky Dharmawan Kosasih

ABSTRAK

Nama : Nicky Dharmawan Kosasih
NPM : 2013310004
Judul : Mewirusahaakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai Demokrasi
(Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa praktik karakteristik kewirausahaan publik (*Public Entrepreneurship*) dan nilai-nilai demokrasi (*Democratic Values*) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori kewirausahaan publik untuk menjelaskan peran pemerintah di Kota Bandung dalam mengelola sumber daya publik yang terbatas dengan cara mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang, melakukan inovasi, keberanian dalam mengambil resiko serta adanya otonomi atau diskresi dalam mengambil keputusan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai obyek penelitian. Penelitian ini difokuskan terhadap 24 SKPD Kota Bandung, dengan jumlah informan sebanyak 76 orang. Panduan wawancara penelitian ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan karakteristik Kewirausahaan Publik yaitu memanfaatkan peluang, melakukan inovasi, pengambilan resiko, dan memiliki otonomi dalam pembuatan keputusan serta nilai-nilai demokrasi seperti, akuntabilitas, transparansi, inklusif dan *stewardship*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik kewirausahaan publik yang paling menonjol di SKPD Kota Bandung adalah memanfaatkan peluang dan melakukan inovasi. Sedangkan karakteristik yang kurang menonjol adalah keberanian dalam mengambil resiko dan memiliki otonomi/diskresi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara karakteristik kewirausahaan publik, yaitu: melakukan inovasi dengan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, inklusif, dan *stewardship*.

Kata Kunci: Kewirausahaan Publik, Nilai-Nilai Demokrasi, Sektor Publik, Organisasi Pemerintah, Emerintah Daerah.

ABSTRACT

Name : Nicky Dharmawan Kosasih

NPM : 2013310004

Title : *Resolving the contradictory concept of Public Entrepreneurship and Democratic Values in Local Government Level: Case Study: Bandung Municipal Government*

This research aims to analyze the characteristics of Public Entrepreneurship and how it can be attuned to Democratic values in Regional Work Units in Bandung Municipal Government. This research uses public entrepreneurship theory to explain the role of Regional Work Units in managing the limited public resources by identifying opportunities, creating innovation, risk taking, and their autonomy in making decisions.

This research applies qualitative method using case study research design in Work Regional Units in Bandung Municipal Government. The Researcher uses observation, and interviews as the data techniques. The data was then analyzed using descriptive analysis to obtain depth understanding of the research object. This research focuses on 24 Regional Work Units, with total 76 informants. The research's interview guide consists of questions about public entrepreneurship characteristics such as identifying opportunities, creating innovation, taking risks, and their autonomy in making decisions and democratic values such as accountability, transparency, inclusive, and stewardship.

The results of this research indicate that the most observable public entrepreneurship characteristic are the ability to identify the opportunities and creating innovations. Other characteristic such as risk taking and autonomy are less observable. This research also shows that creating innovations is the only congruent characteristic of public entrepreneurship to democratic values such as accountability, transparency, inclusive, and stewardship

Keywords: Public Entrepreneurship, Democratic Values, Public Sector, Government Organization, Local Government.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah dan berkat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Mewirauahakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai Demokrasi (Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)”**. Skripsi ini merupakan prasyarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang dapat membantu menyempurnakan skripsi ini dan mengembangkan kemampuan serta pengetahuan penulis di kemudian hari.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan kedua saudara penulis yang selalu mendukung apapun keputusan yang saya lakukan dan selalu menyayangi penulis dengan cara mereka sendiri.
2. Dosen pembimbing penulis sekaligus Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpar Ibu Tutik Rachmawati S.IP.,MA.,Ph.D.
3. Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpar Kristian Widya Wicaksono, S.Sos.M.Si.

4. Bapak Hubertus Hasan Ismail selaku dosen wali penulis.
5. Segenap dosen pengajar, staf pelaksana, serta seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan.
6. Rekan-rekan seperjuangan dalam penulisan skripsi, Ni Made Eti Widhari, Christy Natalia dan Puti Tiara.
7. Eka, Ika, dan Nadira selaku teman pertama penulis selama berkuliah di Prodi Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpar
8. Robby Abdul Malik selaku teman yang selalu menemani penulis selama mewawancarai informan-informan
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik (HMPSIAP) periode 2014-2015 dan periode 2015-2016, yang telah memberikan pengalaman bagi penulis.
10. Dewi, Karisa, Tasya dan Afni serta keluarga besar Administrasi Publik angkatan 2013 yang tidak dapat disebutkan satu persatu
11. Lochea, Dandy, Valdi, Giovanni, Mitha yang selalu memberikan penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

12. Femmi, Bugi, Karina, dan Wira sebagai teman kelompok KKL penulis

13. Mohamad Dida yang selalu membantu dan meluangkan waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan yang telah diberikan semua pihak kepada penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, 21 Januari 2017

Nicky Dharmawan Kosasih

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR DIAGRAM.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Akademis	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Kewirausahaan Publik.....	14
2.2 Karakteristik Kewirausahaan Publik.....	18
2.2.1 Kemampuan Mengidentifikasi dan Memanfaatkan Peluang	18

2.2.2 Melakukan Inovasi.....	20
2.2.3 Keberanian Mengambil Resiko.....	21
2.2.4 Memiliki Otonomi atau Diskresi.....	22
2.3 Nilai-Nilai Demokrasi.....	23
2.3.1 Akuntabilitas	25
2.3.2 Transparansi	27
2.3.3 Inklusif	29
2.3.4 Kepedulian Terhadap Nilai Publik yang Bersifat Jangka Panjang (<i>Stewardship</i>)	30
2.4 Perwujudan Nilai-nilai Demokrasi dalam Mewirauahakan Pemerintah .	31
2.5 Kerangka Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Peran Peneliti	39
3.3 Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Operasional Variabel.....	41
3.5 Sumber Data.....	46
3.6 Prosedur Pengumpulan Data.....	48
3.6.1 Wawancara Mendalam.....	48
3.7 Analisis Data	49
3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan.....	52

5.2 Nilai-nilai Demokrasi.....	93
5.2.1 Akuntabilitas	94
5.2.2 Transparansi	95
5.2.3 Inklusif	97
5.2.4 Kepedulian Terhadap Nilai Publik yang Bersifat Jangka Panjang (<i>Stewardship</i>)	99
BAB VI PEMBAHASAN.....	101
6.1 Karakteristik Kewirausahaan Publik di SKPD Kota Bandung	101
6.1.1 Karakteristik Kewirausahaan Publik: Mengidentifikasi dan Memanfaatkan Peluang.....	102
6.1.2 Karakteristik Kewirausahaan Publik: Kemampuan Menciptakan Inovasi	112
6.1.3 Karakteristik Kewirausahaan Publik: Keberanian Mengambil Resiko.....	125
6.1.4 Karakteristik kewirausahaan publik: Memiliki Otonomi atau Diskresi	135
6.2 Nilai-Nilai Demokrasi.....	145
6.2.1 Akuntabilitas SKPD Kota Bandung.....	145
6.2.2 Transparansi di SKPD Kota Bandung.....	150
6.2.3 Sifat Inklusif di SKPD Kota Bandung	156
6.2.4 Kepedulian Terhadap Nilai Publik yang Bersifat Jangka Panjang (<i>Stewardship</i>)	164

6.3 Karakteristik Kewirausahaan Publik dan Nilai-nilai Demokrasi (<i>Good Public Entrepreneurship</i>).....	174
6.3.1 Menciptakan Inovasi dengan <i>Stewardship</i> di SKPD Kota Bandung	175
6.3.2 Menciptakan Inovasi dengan Inklusif dan <i>Stewardship</i> SKPD Kota Bandung	179
6.3.3 Menciptakan Inovasi dengan Akuntabel, Transparan, dan <i>Stewardship</i> di SKPD Kota Bandung	182
BAB VII SIMPULAN DAN SARAN.....	188
7.1 Simpulan	188
7.2 Saran.....	191
7.3 Rekomendasi Untuk Penelitian Lanjutan.....	192
DAFTAR PUSTAKA	193
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar SKPD Kota Bandung yang Menjadi Objek Penelitian	40
Tabel 4.1	Daftar Profil Penelitian SKPD Kota Bandung yang Menjadi Objek Penelitian.....	59
Tabel 4.2	Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Penelitian Mengenai “Mewirusahaakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-nilai Demokrasi. Studi Kasus: SKPD Kota Bandung	35
Gambar 4.1	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kota Bandung. Berdasarkan Perda SOTK 2007, Perda SOTK 2009 & Perubahan Kedua SOTK 2013	56
Gambar 4.2	Waktu Pencapaian Target Janji- Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	66
Gambar 6.1	GAMPIL, Inovasi BPPPT di Bidang PelayananPperizinan	176
Gambar 6.2	Duta Pajak sebagai Inovasi dari Dinas Pelayanan Pajak	184

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 6.1	Cara yang Digunakan oleh Kabid maupun Pejabat lainnya di SKPD Kota Bandung dalam Mengidentifikasi Peluang.....	104
Diagram 6.2	Keuntungan yang diperoleh SKPD dalam Memanfaatkan Peluang .	107
Diagram 6.3	Keterbatasan Sumberdaya yang dialami SKPD dalam memanfaatkan peluang	110
Diagram 6.4	Bentuk Inovasi yang Dilakukan SKPD Kota Bandung.....	114
Diagram 6.5	Alasan SKPD Melakukan Inovasi.....	119
Diagram 6.6	Alasan SKPD Tidak Melakukan Inovasi	123
Diagram 6.7	Informan Melaksanakan Aktivitas Yang Ditujukan Untuk Mengawali Perubahan di SKPD Tempat Mereka Bekerja.....	128
Diagram 6.8	Informan Melakukan Perubahan Atas Kemauan Sendiri.....	129
Diagram 6.9	Memanfaatkan Peluang Meskipun Bertentangan dengan Aturan.....	130
Diagram 6.10	Adanya Sanksi saat melakukan Pekerjaan tidak sesuai dengan SOP	131

Diagram 6.11 Keberanian Menerima Konsekuensi	132
Diagram 6.12 Pengambilan Resiko dilakukan guna Memberikan Pelayanan Publik yang lebih baik	133
Diagram 6.13 Kebebasan yang Diberikan Dalam Mengambil Keputusan	136
Diagram 6.14 Keputusan yang diambil oleh Kabid atau pejabat lainnya	137
Diagram 6.15 Keputusan informan yang diterima oleh Berbagai Pihak	143
Diagram 6.16 Kesempatan untuk Mempertanggungjawabkan Keputusan	144
Diagram 6.17 Temuan dalam Hasil Pengawasan.....	148
Diagram 6.18 Tindak Lanjut SKPD terhadap Temuan pada Hasil Pengawasan	149
Diagram 6.19 Akses Masyarakat terhadap Hasil Tindaklanjut dan LHP	153
Diagram 6.20 Tindaklanjut SKPD terhadap LHP dimuat di Media	154
Diagram 6.21 Keterlibatan Masyarakat terhadap Pengambilan Keputusan SKPD .	157
Diagram 6.22 Cara SKPD Melibatkan Masyarakat	159
Diagram 6.23 Tanggapan Masyarakat terhadap Pelibatan dalam Pengambilan Keputusan.....	163
Diagram 6.24 Cara SKPD dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat.....	165
Diagram 6.25 Jumlah Perolehan Suara dalam Menentukan Tujuan Pribadi atau Tujuan Organisasi sebagai Prioritas.....	168
Diagram 6.26 Alasan dalam Pemilihan Tujuan Pribadi dan atau Tujuan Organisasi Sebagai Prioritas.....	170
Diagram 6.27 Alasan dalam Menjaga Kepercayaan Masyarakat dan Menggunakan Uang Publik secara Hati-hati	173

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya konsep kewirausahaan merupakan sebuah konsep yang berkembang di dalam sektor privat. Konsep kewirausahaan sering dikaitkan dengan inovasi serta kreativitas, dimana kedua hal itu merupakan unsur yang penting bagi sektor privat demi meraup laba sebanyak-banyaknya. Selain itu, lingkungan organisasi yang relatif bebas dan fleksibel sangat mendukung perkembangan kewirausahaan di tengah-tengah organisasi sektor privat. Akibat situasi itulah banyak orang yang kemudian beranggapan bahwa konsep kewirausahaan hanya cocok dan hanya dapat diterapkan di organisasi sektor privat.

Namun dalam beberapa dekade terakhir konsep kewirausahaan dikenalkan ke dalam organisasi sektor publik. Adalah Eugene Lewis yang memperkenalkan konsep kewirausahaan ke dalam sektor publik. Ia mendefinisikan *public entrepreneurs* pada tahun 1980 sebagai *a person who creates or profoundly elaborates a public organization so as to alter greatly the existing pattern of allocation of scarce public resource*¹.

¹ E. Lewis, *Public Entrepreneurship Toward a Theory of Bureaucracy Political Power* (Bloomington: Indiana University Press). hlm. 9.

Secara sederhana, Lewis mengatakan bahwa seorang wirausaha publik adalah seseorang yang mampu membuat pola alokasi terhadap sumber daya yang terbatas di dalam organisasi publik. Sumber daya di dalam definisi ini merujuk kepada sumber daya keuangan yang disebagian besar diperoleh dari pungutan pajak. Dalam prakteknya, organisasi publik seringkali dihadapkan pada situasi kekurangan dana untuk membiayai segala aktivitasnya dalam rangka pemenuhan mandat. Sehingga seorang wirausaha publik dituntut untuk berinovasi dalam hal pengalokasian sumber daya.

Perhatian terhadap pengadopsian konsep kewirausahaan publik semakin besar ketika dua ilmuwan Administrasi Publik yaitu David Osborne & Ted Gaebler menulis buku yang berjudul "*Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*". Dengan membawa semangat kewirausahaan ke sektor publik, Osborne dan Gabbler menciptakan paradigma baru di dalam studi administrasi publik, yaitu New Public Management. Di dalam paradigma inilah konsep kewirausahaan public diperkenalkan. Di dalam bukunya, Osborne dan Gabbler mengatakan: *Entrepreneurial institution/public organization] uses resources in new ways to maximize productivity and effectiveness*².

² D. E. Osborne dan T. T. Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneur Spirit is Transforming the Public Sector* (Massachusetts: William Patrick Book, 1992), hlm. xix)

Berdasarkan definisi kewirausahaan publik tersebut, suatu organisasi publik yang dipimpin oleh seorang wirausaha publik menggunakan sumber daya dengan cara baru untuk memaksimalkan produktivitas dan efektivitas.

Berdasarkan kedua definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwa baik konsep kewirausahaan di sektor privat maupun publik sama-sama menekankan aspek inovasi dan kreativitas. Hanya saja perbedaannya terletak pada tujuannya. Sektor privat melihat inovasi sebagai suatu instrumen untuk mengakselerasi pendapatan laba di dalam aktivitas usahanya. Sedangkan di sektor publik, inovasi diperlukan untuk menciptakan suatu pola alokasi terhadap sumber daya agar organisasi publik mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas dalam hal pencapaian mandatnya, yaitu menjalankan konstitusi, menerapkan nilai-nilai publik (*public values*) dan kesejahteraan warga (*welfare*).

Untuk mewujudkan inovasinya, seorang wirausaha publik memerlukan diskresi yang besar. Diskresi didefinisikan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan³. Diskresi ini diperlukan agar ia memiliki ruang yang lebih luas untuk bertindak dalam rangka mencari sumberdaya sumberdaya baru. Dengan adanya sumberdaya baru maka

³ Pasal 1 nomor 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

aktivitas organisasi publik tidak akan terbelenggu oleh permasalahan sumberdaya. Selain mencari sumberdaya baru, diskresi diperlukan wirausaha publik untuk menerapkan pola-pola alokasi yang ia yakini lebih efisien dan efektif daripada pola-pola yang telah ada sebelumnya.

Selain inovatif, otonom dan memiliki visi pribadi seorang wirausaha publik juga dituntut untuk menjadi individu yang *risk taker*. Keberanian dalam mengambil resiko sangat diperlukan mengingat sumberdaya publik yang semakin sedikit sedangkan kebutuhan publik cenderung meningkat dan tidak dapat dipuaskan. Keberanian mengambil resiko juga terkait dengan mengubah struktur organisasi atau bahkan budaya organisasi yang sebelumnya telah eksis di organisasi publik. Perubahan terhadap struktur maupun budaya dirasa perlu apabila keduanya tidak mendukung tujuan seorang wirausaha publik, yaitu mewujudkan inovasi yang telah ia rancang.

Di Indonesia, reformasi, demokratisasi serta desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah telah menjadi katalisator pengadopsian konsep kewirausahaan publik di dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah mengakibatkan tanggung jawab yang dijalankan pemerintah daerah semakin berat. Belum lagi dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis mengakibatkan kebutuhan masyarakat yang cepat pula berubah sehingga tidak dapat diakomodir di dalam Undang-Undang.

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Bab XXI pasal 386-390 telah memberikan payung hukum bagi aparat pemerintah daerah dalam menerapkan kewirausahaan publik melalui inovasi daerah. Undang-Undang ini menjadi jaminan agar pengadopsian karakteristik kewirausahaan publik dalam administrasi publik di Indonesia khususnya di level pemerintah daerah tidak diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar hukum serta aturan-aturan yang telah ada.

Namun penyediaan payung hukum itu belum mampu mendorong para kepala daerah maupun jajarannya untuk mengadopsi karakteristik kewirausahaan publik ke dalam praktek administrasi publik di daerahnya. Salah satu bukti yang paling mencolok adalah ketakutan para aparatur pemerintahan di daerah diseret ke wilayah pidana saat melaksanakan suatu kebijakan Hal ini terbukti dari minimnya penyerapan anggaran di sejumlah daerah pada tahun 2015. Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lima pemerintah provinsi yang penyerapan anggarannya sangat rendah hingga Juli 2015. Meski sudah pertengahan tahun, penyerapan anggaran di lima daerah itu masih di bawah 30 persen. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek mengungkapkan, lima daerah dengan anggaran terendah, yakni Kalimantan Utara dengan 18,6 persen, DKI Jakarta 19,2 persen, Papua 21,7 persen, Jawa Barat 25,5 persen, Riau 25,5 persen. lebih lanjut ia menjelaskan ada sejumlah hal yang membuat penyerapan anggaran rendah. Salah

satu yang paling mencolok adalah ketakutan para aparatur pemerintahan di daerah diseret ke wilayah pidana saat melaksanakan suatu kebijakan⁴.

Dari perspektif lembaga pengawasan seperti BPK, pengambilan atau pelaksanaan suatu kebijakan hendaknya perlu dikonsultasikan terlebih dahulu kepada BPK. Dalam konteks upaya menggenjot penyerapan anggaran, Ketua BPK Harry Azhar Aziz mengimbau semua pemerintah daerah agar berkomunikasi dengan pihaknya. Ia mencontohkan, seorang kepala daerah dipersilakan bertanya kepada BPK perihal suatu program yang anggarannya akan dicairkan. Dengan begitu, BPK akan memberikan pendapatnya, apakah program tersebut masih layak atau justru akan menimbulkan potensi kerugian keuangan negara di kemudian hari⁵.

Di level pemerintahan kota/kabupaten penyerapan anggaran pada tahun 2015 mencapai 25,9 persen pada triwulan ketiga. Sedangkan untuk pemerintah Kota Bandung sendiri mencapai 40 persen. Pemkot beralasan, rendahnya serapan anggaran karena banyaknya paket lelang yang belum dibayarkan⁶. Untuk menyelesaikan permasalahan penyerapan anggaran, Walikota Bandung melakukan sejumlah inovasi. Inovasi-inovasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan workshop untuk mengetahui kendala dan melakukan percepatan proyek proyek,

⁴ Ini 5 Provinsi yang Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah diakses pada 4/10/16 pk 19.04 melalui <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16095331/Ini.5.Provinsi.yang.Penyerapan.Anggarannya.Sangat.Rendah>

⁵ Genjot Penyerapan Anggaran, ini Saran BPK diakses pada 4/10/16 pk 19.29 WIB melalui <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/14/nw7841354-genjot-penyerapan-anggaran-ini-saran-bpk>

⁶ APBD Kota Bandung Baru Terpakai 40% diakses pada 4/10/16 pk 20.06 WIB melalui <http://daerah.sindonews.com/read/1040498/151/apbd-kota-bandung-baru-terpakai-40-1441330105>

pemenang lelang akan segera bekerja. Selain itu inovasi yang dilakukan adalah melaksanakan PIPPK (program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan) yang telah direncanakan.

Ketakutan kepala daerah serta aparaturnya di daerah semakin kuat manakala beberapa pejabat yang mengadopsi karakteristik kewirausahaan publik seperti otonomi, visi pribadi, kerahasiaan serta pengambilan resiko terjerat kasus hukum. Pada level pemerintah pusat, mantan Menteri BUMN di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai tersangka korupsi ketika ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara. Dahlan ditetapkan sebagai tersangka dalam posisi sebagai kuasa pengguna anggaran dalam kasus dugaan korupsi pembangunan 21 gardu induk di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara pada 2011-2013. BPKP dalam auditnya menyebutkan bahwa proyek tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 33 miliar. Menurut Kejaksaan, penyimpangan ditemukan antara lain ketika penandatanganan kontrak pembangunan gardu induk pada 2011, tetapi lahannya belum dibebaskan. Hingga tenggat proyek berakhir pada 2013, hanya lima gardu yang dapat dibangun oleh pihak rekanan PT PLN⁷.

Sedangkan di level daerah, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan berhasil mereformasi alokasi anggaran dan pelayanan pemerintah. Ia melakukan inovasi seperti menolak pembangunan rumah dinas, pengadaan mobil dinas bagi bupati dan wakil bupati, serta mencoret alokasi Rp 21 miliar untuk pembangunan kantor

⁷ Dahlan Iskan tersangka kasus korupsi gardu listrik diakses pada 3/30/16 pk 21.28 WIB http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/06/150605_indonesia_dahlaniskan_tersangka

bupati. Penghematan itu membuat komposisi belanja rutin dan belanja publik pada anggaran daerah 2010 yang awalnya 58 persen berbanding 42 persen menjadi 48 persen berbanding 52 persen. Tahun berikutnya, anggaran untuk pegawai dan kedinasan turun lagi jadi 46 persen. Anggaran mobil dinas bupati dan wakil bupati yang masing-masing Rp 1 miliar dialihkan ke program pengadaan 60 sepeda motor untuk bidan desa. Sedangkan anggaran rumah dinas beralih ke pengadaan seragam sekolah, yang tiga tahun terakhir mencapai Rp 14,2 miliar untuk lebih dari 70 ribu siswa kurang mampu⁸.

Namun pada tahun 2013 Masyarakat Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang tergabung dalam Forum Pemerhati Kabupaten Kubu Raya (FPK2R), mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka melakukan aksi damai dan meminta KPK mengusut keterlibatan Bupati Kubu Raya Muda Hendrawan, dalam beberapa dugaan kasus korupsi. Menurut Koordinator FPK2R Sabran ada empat kasus yang melibatkan Bupati Kubu Raya, kasus koperasi pegawai negeri, kasus pengalihan hutan lindung, kasus penerimaan PNS 2010, dan kasus pengadaan seragam sekolah se-Kabupaten Kubu Raya⁹. Kejadian ini semakin menguatkan ketakutan mereka akan bahaya penerapan karakteristik kewirausahaan publik meski telah dijamin oleh Undang-Undang sekalipun.

⁸ Bupati Ini Hemat APBD Rp 30 Miliar per Tahun diakses pada 4/10/16 pk 20.56 WIB melalui <https://nasional.tempo.co/read/news/2012/12/12/058447566/bupati-ini-hemat-apbd-rp-30-miliar-per-tahun>

⁹ Masyarakat Kubu Raya Laporkan Bupati ke KPK diakses pada 4/10/16 pk 20.59 WIB melalui <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/06/21/masyarakat-kubu-raya-laporkan-bupati-ke-kpk>

Adanya permasalahan-permasalahan ini menandakan bahwa penerapan karakteristik kewirausahaan dalam sektor publik perlu dibarengi dengan pemenuhan nilai-nilai demokrasi. Hal ini lah yang disampaikan oleh Carl J. Bellone dan George Frederick Goerl dalam artikel yang berjudul “*Reconciling Public Entrepreneurship and Democracy*”. Menurut mereka karakteristik dari kewirausahaan publik harus dievaluasi dalam hal pertanggungjawaban administratif apakah tindakan-tindakan yang dilakukan telah memenuhi nilai-nilai demokrasi¹⁰. Dalam penerapannya, karakteristik kewirausahaan publik seperti otonomi, visi pribadi, kerahasiaan, serta pengambilan resiko seringkali bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas, partisipasi warga negara, keterbukaan, dan penatalayanan (*stewardship*). Untuk menciptakan administrasi publik yang lebih baik maka kedua hal yang saling bertentangan itu perlu “didamaikan”.

Penerapan nilai-nilai demokrasi dalam praktik kewirausahaan publik menjadi salah satu cara agar praktik kewirausahaan publik nantinya tidak berbenturan dengan aturan hukum yang berlaku serta memiliki persetujuan dari masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai proses formulasi serta pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan yang berbasis inovasi maka baik kepala daerah maupun aparatur daerah memperoleh legitimasi dari masyarakat itu sendiri. Hal ini akan membuat resiko pelanggaran hukumnya

¹⁰ Carl. J Bellone dan George Frederick Goerl, *Reconciling Public Entrepreneurship and Democracy* , Public Administration Review March/April 1992, Vol. 52, No, 2, 1992, hlm. 130.

menjadi kecil. Walaupun suatu pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan itu tidak sesuai aturan namun kesalahan itu dapat dimaklumkan apabila sebelumnya telah dikonsultasikan dengan masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Walikota Bandung menyadari betul pentingnya menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam praktik kewirusahaan publik. Dengan adanya PIPPK, penyerapan anggaran di kota Bandung mencapai 90 persen pada bulan Desember. Menurutnya, penghujung tahun 2015 ini ada 20 Kecamatan yang penyerapan PIPPK-nya diatas 90 persen. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya, penyerapannya sudah berada di sekitar 50, 60 dan 80 Persen. Dengan PIPPK ini, ia berpesan Pemkot Bandung terus memonitor pembangunan berbasis kewilayahan. Menurutnya, banyak laporan yang positif, sehingga warga tidak repot-repot menunggu dari dinas terkait, karena prosedur yang terlalu panjang. Ia pun berharap PIPPK ini harus jadi percontohan tentang pembangunan cepat memotong jalur birokrasi yang terlalu panjang. Walikota menitipkan kepada Camat-Camat, untuk ditahun depan agar aspirasi warganya tidak ada yang terlewatkan¹¹. Selain program PIPPK yang diinisiasi oleh Ridwan Kamil, terdapat 42 inovator dalam ajang tersebut yang terbagi ke dalam 10 klaster. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang menjadi inovator antara lain Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung di klaster Pelayanan terpadu, Dinas Kesehatan Kota Bandung di Klaster Pelayanan Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

¹¹ Penyerapan Anggaran PIPPK Kota Bandung Capai 90 Persen diakes pada 4/10/16 pk 21.50 WIB melalui <https://obsessionnews.com/penyerapan-anggaran-pippk-kota-bandung-capai-90-persen/>

Daerah Kota Bandung di Klaster Pelayanan Transparansi Anggaran e-Budgeting, Dinas Sosial Kota Bandung di Klaster Pelayanan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung di Klaster Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah kota Bandung di Klaster Pelayanan Perpustakaan dan Arsip¹².

Kasus Muda Mahendrawan dan Ridwan Kamil paling tidak mengindikasikan perlunya menerapkan nilai-nilai demokrasi ke dalam praktik kewirausahaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila Muda Mahendrawan terkesan mengabaikan nilai-nilai demokrasi dalam melakukan inovasi di daerah, Ridwan Kamil malah sebaliknya. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil telah mengindikasikan bahwa pengkombinasian penerapan nilai-nilai demokrasi seperti akuntabilitas, partisipasi warga negara, keterbukaan, dan kepedulian terhadap nilai publik yang bersifat jangka panjang (*stewardship*) dan kewirausahaan publik dapat menyelesaikan permasalahan publik dan menciptakan praktik administrasi yang lebih baik.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti pengadopsian karakteristik kewirausahaan publik yang disertai dengan penerapan nilai-nilai demokrasi di seluruh SKPD Kota

¹²Kota Bandung Salah Satu Inovator Pelayanan Publik diakses pada 1/17/17 pk 23.12 WIB melalui <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/10/26/kota-bandung-salah-satu-inovator-pelayanan-publik-383192>

Bandung dengan judul penelitian: **“Mewirauahakan Pemerintah untuk Perwujudan Nilai-Nilai Demokrasi (Studi Kasus: SKPD Kota Bandung)”**

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana praktek kewirausahaan publik di SKPD Kota Bandung?
- b. Apakah praktek kewirausahaan publik di SKPD Kota Bandung telah mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian dengan judul Mewirauahakan Pemerintah dan Perwujudan Nilai-Nilai Demokrasi (Studi Kasus: SKPD Kota Bandung) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek kewirausahaan publik di SKPD Kota Bandung
2. Untuk mengetahui apakah praktek kewirausahaan publik tersebut telah memperhatikan nilai-nilai demokrasi

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuktikan penerapan nilai-nilai demokrasi memiliki hubungan terhadap praktek Kewirausahaan Publik (*Public Entrepreneurship*) di Pemerintah Kota Bandung (Perbaiki sesuai mengikuti tujuan penelitian yang sudah saya tuliskan diatas)

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah Kota Bandung dalam memahami hubungan kewirausahaan publik dengan nilai-nilai demokrasi dan sebagai acuan dalam menerapkan kewirusahaan publik dan nilai-niali demokrasi